

**KEBIJAKAN MONETER DAN FISKAL DALAM MENINGKATKAN
PEREKONOMIAN NASIONAL DAN IMPLIKASINYA TERHADAP ANGGARAN
PERTAHANAN (STUDI KASUS PROVINSI TIMOR TIMUR DI INDONESIA PADA
TAHUN 1976-1998)**

**MONETARY AND FISCAL POLICY IN IMPROVE THE NATIONAL ECONOMY AND
THE IMPLICATION OF DEFENSE BUDGET (CASE STUDY OF TIMOR TIMUR
PROVINCE IN INDONESIA PERIOD 1976-1998)**

Frans Herry Wahyudi Amnifu
EKONOMI PERTAHANAN, FAKULTAS MANAJEMEN PERTAHANAN, UNIVERSITAS
PERTAHANAN
fransjogja@yahoo.com

Abstrak-Penelitian ini mengkaji mengenai peran pemerintah Indonesia dalam melakukan kebijakan moneter dan fiskal, dalam rangka memperkuat perekonomian secara luas, selama periode 1976-1998. Untuk memfokuskan penelitian, penelitian ini di Wilayah Provinsi Timor - Timur Indonesia selama periode 1976 -1998. Timor Timor merupakan wilayah baru yang masuk ke wilayah Indonesia. Dalam rangka memperkuat wilayah Indonesia, anggaran pertahanan adalah kunci untuk memperkuat kedaulatan wilayah. Sebuah negara memiliki anggaran pertahanan sebesar 1% - 3% dari pendapatan negara. Saat ini, Indonesia berupaya untuk mencapai anggaran pertahanan minimal atau *minimum essential force* (MEF). Saat ini, anggaran pertahanan Indonesia, baru mencapai 0,98%. Bila pertahanan negara kuat, maka negara mampu membangun perekonomian negara secara berkelanjutan. Adapun teori yang digunakan dalam mendukung penelitian ini, diantaranya , kebijakan fiskal, kebijakan moneter, teori ekonomi mikro, teori ekonomi makro serta anggaran pertahanan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, melalui observasi, maupun terjun ke lapangan bertemu dengan pelaku sejarah. Pada tahun 1976, Timor – Timur merupakan provinsi baru di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Timor – Timur mendapatkan kucuran dana APBN (Anggaran Pembiayaan Belanja Negara) dan dana OTSUS (Otonomi Khusus), sebagai bentuk perhatian Pemerintah Indonesia, untuk membangun Timor – Timur. Sebagai provinsi termuda di Indonesia kala itu, Timor – Timur mendapatkan dukungan penuh dari pemerintah pusat, agar Timor – Timur menjadi wilayah yang tumbuh, baik dari segi perekonomian maupun pertahanan. Dukungan Pemerintah Indonesia terhadap Wilayah Timor – Timur, merupakan implementasi konsitusi Indonesia, dalam menjaga kedaulatan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kata Kunci : anggaran pertahanan, kebijakan fiskal, kebijakan monete

Abstract-This study examines the role of the Indonesian government in conducting monetary and fiscal policy, in the context of strengthening the economy at large, during the 1976-1998 period. To focus the research, this research was conducted in the territory of the Indonesian East Timor Province during the period 1976-1998. Timor Timor is a new territory entering Indonesia. In the context of strengthening Indonesian territory, defense budget is the key to strengthening regional sovereignty. A country has a defense budget of 1% - 3% of state revenue. At present, Indonesia is striving to achieve a minimum or *minimum essential force* (MEF) defense budget. At present, Indonesia's defense budget has only reached 0.98%. If the national defense is strong, the state is able to build the country's economy in a sustainable manner. The theories used in supporting this research include fiscal policy, monetary policy, microeconomic theory, macroeconomic theory and defense budget. This study uses qualitative research methods, through observation, as well as going into the field to meet with

historical actors. In 1976, East Timor was a new province in the Territory of the Republic of Indonesia. East Timor receives funding from the National Budget (APBN) and OTSUS (Special Autonomy) funds, as a form of attention of the Government of Indonesia, to develop East Timor. As the youngest province in Indonesia at that time, East Timor received full support from the central government, so that East Timor would become a growing region, both in terms of economy and defense. The Government of Indonesia's support for the East Timor Region is an implementation of the Indonesian constitution, in maintaining the territorial sovereignty of the Unitary State of the Republic of Indonesia.

Keyword : defense budget, fiscal policy, moneter policy

Pendahuluan

Pada tahun 1976, wilayah Timor – Timur merupakan provinsi baru di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Sebelum menjadi bagian wilayah Indonesia, wilayah Timor – Timur merupakan wilayah kolonisasi bangsa portugis selama 450 tahun. Setelah mengalami kolonisasi yang berkepanjangan, Timor – Timur meminta bantuan kepada pemerintah Indonesia, hingga menjadi bagian wilayah Indonesia. Wilayah Timor-Timur merupakan wilayah darat, yang berbatasan langsung dengan wilayah Indonesia. Wilayah Timor-Timur, mengalami konflik yang berkepanjangan. Akibat konflik yang berkepanjangan, menyebabkan gangguan bagi stabilitas politik bagi kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Indonesia perlu ikut andil dalam membantu penyelesaian konflik di Wilayah Timor – Timur. Presiden Soeharto mengirimkan ABRI (Angkatan Bersenjata Republik Indonesia) ke wilayah Timor –Timur, untuk melakukan

stabilitas keamanan di wilayah tersebut. Wilayah Timor-Timur menjadi rebutan antar negara, disebabkan oleh status negara yang belum memiliki kedaulatan. Selain itu, potensi ekonomi di celah timor, yaitu minyak mentah, menjadi komoditas yang ingin dikuasai oleh satu pihak.



Gambar 1. Peta Wilayah Timor – Timur
Sumber : Data Diolah Sendiri, 2020

Saat konflik wilayah Timor –Timur berkejolak, Indonesia mengalami pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Pertumbuhan ekonomi Indonesia pernah mengalami titik puncak, yaitu mencapai 7%. Pertumbuhan ini merupakan puncak ekonomi yang tertinggi, serta dialami oleh pemerintah Indonesia. Ketika Indonesia turut ikut andil dalam

penanganan konflik Wilayah Timor Timur, Indonesia mendorong penuh perdamaian di Timor – Timur. Hingga akhirnya, pada tahun 1976, Wilayah Timor – Timur masuk kedalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Indonesia mengeluarkan UU No.7 Tahun 1976 Tentang Pengesahan Penyatuan Timor – Timur ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Meskipun telah masuk wilayah NKRI, Timor – Timur mengalami masa integrasi selama dua tahun. Selama masa dua tahun, Wilayah Timor – Timur mengalami penyesuaian dengan sistem pemerintah Indonesia. Pemerintah Indonesia memberikan perhatian yang khusus kepada Wilayah Timor – Timur. Saat itu, Ketika Wilayah Timor – Timur bersatu dengan Wilayah NKRI Presiden Soeharto mengatakan bahwa bersatunya Timor – Timur sebagai “kembalinya anak yang hilang”. Selama masa integrasi, Pemerintah Indonesia membangun infrastruktur di Wilayah Timor – Timur. Pemerintah Indonesia memperbaiki akses serta jalan di seluruh Wilayah Timor – Timur. Hal ini dilaksanakan, agar Wilayah Timor – Timur dapat memiliki akses ke luar, sehingga aktivitas pertukaran barang dan jasa, serta bisnis dapat berjalan sebagaimana mestinya.



Gambar 2. Integrasi Wilayah Timor – Timur ke Republik Indonesia
Sumber : Ajim, 2020

Dalam mendukung pembangunan dan perekonomian di Wilayah Timor – Timur, Pemerintah Indonesia memberikan dana OTSUS (Otonomi Khusus), agar percepatan ekonomi dapat bergerak secara cepat. Sehingga, Wilayah Timor – Timur dapat menjadi suatu kesatuan utuh dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kedaulatan wilayah merupakan kewajiban negara untuk menjaga. Dana OTSUS merupakan dana khusus yang diberikan oleh Pemerintah Indonesia, kepada daerah-daerah di Indonesia, dengan ketentuan dan syarat yang berlaku. Sebagai Provinsi baru dan termuda, Wilayah Timor – Timur mendapatkan Dana OTSUS dari Pemerintah Indonesia. Hal ini dilakukan agar tidak terjadi ketimpangan dengan daerah lain di Wilayah Indonesia. Untuk memperkuat Wilayah Timor – Timur setelah melewati masa integrasi selama dua tahun, serta mendapatkan kucuran dana APBN, satu instrument Pemerintah

Indonesia dalam memperkuat Wilayah Timor – Timur, Pemerintah Indonesia, meningkatkan anggaran pertahanan, dalam rangka menjaga kedaulatan di Wilayah Timor – Timur pasca menjadi bagian dari Wilayah NKRI. Sinergi antara kebijakan moneter dan kebijakan fiskal dapat mendorong anggaran pertahanan menjadi lebih meningkat. Anggaran pertahanan merupakan kebijakan strategis pemerintah dalam mendukung kedaulatan negara. Khusus bagi Wilayah Timor – Timur, anggaran pertahanan diperlukan, dalam rangka peningkatan ketahanan di wilayah tersebut.

Ruang Lingkup Penelitian

Untuk lebih mengarahkan penelitian ini agar sesuai dengan tujuan yang dicapai, maka perlu dilakukan batasan penulisan, yaitu daerah penelitian adalah Timor - Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur dan penelitian ini terbatas kepada kebijakan moneter & fiskal dan implikasi terhadap anggaran pertahanan pada tahun 1976 – 1998. Dalam tulisan ini, penelitian menggunakan metode penelitian deskriptif yang bertujuan untuk menggambarkan sesuatu dengan pernyataan yang jelas mengenai masalah yang dihadapi dengan hipotesis yang

spesifik dari informasi detail yang dibutuhkan (Sugiono, 2010).

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Penggunaan metode kualitatif yakni penelitian guna meneliti kondisi obyek yang alamiah dimana peneliti sebagai instrumen kunci menggunakan analisis data induktif dan hasil penelitian tidak menekankan pada generalisasi (Sugiyono, 2014, p.9). Dari berbagai desain penelitian dari metode kualitatif, dalam penelitian kebijakan moneter dan fiskal, implikasi terhadap ekonomi pertahanan (studi kasus pendudukan Timor Leste 1970-1980) menggunakan desain penelitian sejarah. Menurut Nazir (2013, pp.36-37) menyatakan desain penelitian sejarah yakni penyelidikan kritis terhadap keadaan, perkembangan, serta pengalaman di masa lampau dan menimbang secara teliti dan hati-hati tentang bukti validitas dari sumber sejarah, serta interpretasi dari sumber-sumber keterangan tersebut. Metode sejarah menurut Daliman (2012) dapat diartikan sebagai metode penelitian dan penulisan sejarah dengan menggunakan cara, prosedur atau Teknik secara sistematis sesuai dengan asas-asas dan

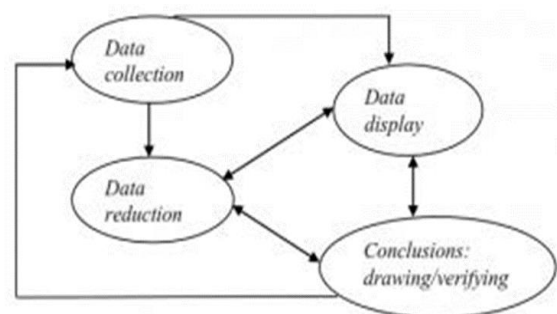
aturan ilmu sejarah. Penelitian sejarah memiliki beberapa ciri, yakni: (Nazir, 2013).

1. Lebih banyak menggantungkan diri pada data yang diamati orang lain di masa lampau.
2. Data yang digunakan lebih banyak bergantung pada data primer dibanding data sekunder. Bobot data dikritik baik secara internal maupun eksternal.
3. Pencarian data lebih tuntas dan penggalian informasi difokuskan pada sumber-sumber data tua yang dikutip dalam bahan acuan standar.
4. Sumber data harus dinyatakan secara definitif dan diuji kebenaran dan ketulenannya.

Penelitian ini berusaha untuk mengungkap dan menganalisa kebijakan moneter Indonesia pada masa lampau, yakni masa pemerintahan Republik Indonesia Orde Baru berfokus pada masa Timor-Timur Tahun 1976-1998. Kebijakan moneter yang dimaksud adalah kebijakan moneter dalam mendukung pertahanan negara. Hal ini dilatarbelakangi bahwa pada masa pemerintahan Republik

Indonesia Orde Baru berfokus pada masa Timor-Timur (1976-1998), meskipun dalam masa pembangunan, akan tetapi harus mengeluarkan anggaran yang besar untuk mendukung pendudukan ke Timor-Timur.

Teknik analisis data yang digunakan menggunakan metode kualitatif. Pemilihan metode kualitatif bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis penelitian kebijakan moneter dan fiskal, implikasi terhadap ekonomi pertahanan (studi kasus pendudukan Timor Leste 1970-1980). Analisis data dalam penelitian ini menggunakan model analisis data dari Miles, Huberman dan Saldana (2014) yang disebut dengan analisis data model interaktif yang meliputi kondensasi data (*data condensation*), penyajian data (*data display*) dan penarikan kesimpulan atau verifikasi (*conclusion/ verifying*)¹.



Gambar 3. Miles & Huberman Pattern
Sumber : Data Diolah Sendiri, 2020

¹ Creswell, John W. . 2015. *Penelitian Kualitatif & Desain Riset Memilih diantara Lima Pendekatan*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar

Hasil Penelitian

Gambaran Umum

Dinamika politik di Indonesia pada tahun 1976 – 1998 mengalami situasi pasang surut. Indonesia menghadapi berbagai tantangan serta rintangan, sebagai negara yang belum merdeka, serta berusaha untuk menjadi negara kuat diantara negara-negara di Asia Tenggara maupun di Asia Pasifik. Sebagai negara yang berdaulat, ekonomi adalah kunci dari kekuatan sebuah negara. Era Presiden Soeharto selama periode 1967 – 1998, Indonesia menghadapi resistensi kedaulatan negara. Beberapa wilayah di Indonesia, masih menghadapi konflik lokal yang berkepanjangan. Hal ini disebabkan oleh masyarakat Indonesia yang beragam. Selain itu, Indonesia pihak-pihak yang melakukan pemberontakan terhadap pemerintah.

Salah satu problem Pemerintah Indonesia kala itu, Indonesia menghadapi tingkat pengangguran yang cukup tinggi. Hal ini disebabkan pasca periode mempertahankan kemerdekaan, segala sumber daya dikerahkan, demi terjaganya keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Setelah itu, rakyat Indonesia banyak yang terlantar akibat harta benda digunakan untuk berjuang. Presiden Soeharto berupaya untuk melakukan

revitalisasi perekonomian Indonesia di seluruh lapisan masyarakat. Salah satu cara, pemerintah saat itu, melakukan pembangunan di bidang pertanian. Rencana pemerintah Indonesia dalam membangun ketahanan pangan, di tuangkan dari Rencana Pembangunan Lima Tahun atau REPELITA.

Puncak dari kesuksesan Rencana Pembangunan Lima Tahun atau REPELITA, Indonesia mampu menjadi negara penghasil beras se-dunia. Dunia mengakui kehebatan Indonesia, mampu menghasilkan beras secara mandiri. Indonesia mendapatkan penghargaan dari FAO (Food Agriculture Association), salah satu lembaga PBB bergerak di bidang pangan pada tahun 1994. Selain menghadapi isu ketahanan pangan dan pengangguran, kedaulatan wilayah masih menjadi tantangan bagi pemerintahan di era Bapak Presiden Soeharto, dalam menjaga keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Salah satu wilayah yang menjadi perebutan antara Indonesia dan negara – negara di kawasan Asia – Tenggara, yaitu Sipadan dan Ligitan.

Sipadan dan Ligitan merupakan bagian dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Akan tetapi, ada klaim dari sebuah negara, bahwa kedua

wilayah tersebut merupakan bukan wilayah kedaulatan Indonesia. Presiden Soeharto dengan tegas, bahwa Sipadan dan Ligitan adalah bagian dari wilayah kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selain persoalan Sipadan dan Ligitan, Indonesia menghadapi persoalan Timor – Timur. Wilayah Timor – Timur berada di wilayah bagian Indonesia Timur. Timor – Timur merupakan wilayah darat, yang berbatasan langsung dengan wilayah Indonesia. Wilayah Timor – Timur merupakan wilayah yang dikolonialisasi oleh bangsa portugis. Timor – Timur di kolonialisasi oleh bangsa portugis selama 450 tahun.

Untuk menciptakan perdamaian di Wilayah Timor - Timur, Indonesia secara inisiatif, ikut andil dalam menciptakan perdamaian, melalui operasi seroja. Presiden Soeharto, mengirimkan pasukan ke Wilayah Timor – Timur untuk melakukan operasi cipta kondisi Timor – Timur. Pada tahun 1976, Wilayah Timor – Timur menjadi bagian dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Wilayah Timor – Timur melewati masa integrasi menjadi bagian Negara Indonesia selama 2 tahun. Selama masa integrasi, pemerintah Indonesia memperbaiki infrastruktur, fasilitas umum, sarana dan prasarana di Wilayah Timor – Timur,

dalam rangka membangun wilayah tersebut, menjadi sebuah wilayah utuh, dan bagian dari wilayah kedaulatan Indonesia.

Ada dua instrument yang digunakan oleh pemerintah Indonesia dalam mendukung kedaulatan wilayah di Provinsi Timor – Timur, yaitu kebijakan moneter dan kebijakan fiskal. Selain itu, pemerintah dapat mendorong keutuhan wilayah Provinsi Timor – Timur melalui peningkatan anggaran pertahanan. Maka dari itu, penelitian ini akan mengkaji mengenai kebijakan moneter & fiskal dan implikasi terhadap anggaran pertahanan, dengan studi kasus di Provinsi Timor – Timur pada tahun 1976 – 1998.

Profil Provinsi Timor – Timur

Letak Geografis Provinsi Timor Timur

Letak geografis Provinsi Timor – Timur terletak di posisi 8° 50' lintang selatan dan 125° 55' bujur timur. Adapun batas-batas wilayah Provinsi Timor – Timur, diantaranya :

Batas Timur : Laut Arafuru

Batas Darat : Kabupaten Belu dan Batas Laut Selat Ombai

Batas Utara : Selat Wetar

Batas Selatan : Laut Timor

Provinsi Timor – Timur memiliki luas wilayah sebesar 15.007 km²



Gambar 4. Peta Provinsi Timor – Timur
Sumber : Google.com, 2020

Provinsi Timor – Timur memiliki dua musim, yaitu musim panas dan musim penghujan. Musim panas dimulai di bulan dari akhir bulan Mei hingga awal bulan Oktober. Sedangkan musim hujan di mulai dari awal bulan Mei hingga awal bulan November. Provinsi Timor – Timur dibagi menjadi tiga wilayah, yaitu ; utara, tengah, dan selatan. Wilayah utara dan selatan merupakan wilayah yang memiliki iklim yang panas. Bila matahari terik, maka cuaca di kedua daerah tersebut akan meningkat suhunya. Akan tetapi, di wilayah selatan, memiliki suhu yang normal, disebabkan masih memiliki hutan tropis. Sedangkan wilayah tengah, merupakan wilayah yang memiliki suhu normal.

Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk Provinsi Timor – Timur mencapai 1.066.582 juta jiwa pada tahun 2010, selain itu tingkat kenaikan

penduduk di Provinsi Timor – Timur mencapai 2,95% per tahun, selain itu, kepadatan penduduk Provinsi Timor – Timur mencapai 69 km² (Badan Pusat Statistik, 2010). Etnis atau suku yang berada di Provinsi Timor – Timur memiliki etnis yang berbeda. Etnis endemik di Provinsi Timor – Timur yang menjadi mayoritas di Provinsi Timor – Timur, yaitu Melayu – Polinesia. Provinsi Timor – Timur merupakan wilayah bekas jajahan bangsa portugis. Maka dari itu, terdapat berbagai macam etnis yang berada di Provinsi Timor – Timur, diantaranya ; India, Eropa, China, Afrika, Arab. Mereka datang ke wilayah Provinsi Timor – Timur, disebabkan oleh bangsa portugis yang membawa mereka sebagai budak. Setelah merdeka, mereka menjadi warga serta melakukan pernikahan, sehingga mereka menjadi keluarga yang menempati wilayah Provinsi Timor – Timur. Maka dari itu, Provinsi Timor – Timur memiliki keberagaman yang cukup banyak. Mayoritas agama di wilayah Provinsi Timor – Timur, 98% menganut agama Katholik Roma, 1% beragama Kristen, 1% beragama Islam, Hindu – Budha, dan agama kepercayaan adat – istiadat. Adapun kepercayaan lokal berkaitan dengan kepercayaan adat – istiadat. Bangsa portugis menyebarkan

agama Katholik Roma, ketika menjajah wilayah Timor – Timur. Mata pencaharian penduduk Timor – Timur, sebagian besar masih mengandalkan pertanian. Metode pertanian yang digunakan masih menggunakan metode pertanian tradisional. Akan tetapi, pada tahun 2007, para petani menggunakan traktor dalam mengolah pertanian mereka. Sebagian lagi, berprofesi sebagai pengusaha, pegawai pemerintah, dan lain sebagainya. Timor – Timur memiliki potensi alam yang luar biasa, salah satunya potensi celah timor yang mengandung sumber kekayaan minyak dan gas. Salah satu upaya pemerintah Timor – Timur, untuk mempersiapkan SDM (sumber daya manusia, agar mampu mengelola celah timor. Potensi yang dimiliki oleh Provinsi Timor – Timur, merupakan asset bagi wilayah tersebut. Saat ini, pengelolaan hasil bumi di Celah Timor, masih didominasi oleh perusahaan – perusahaan negara maju. Salah satunya, Negara Australia. Hal ini disebabkan oleh, Provinsi Timor – Timur berdekatan dengan Negara Australia. Perusahaan-perusahaan dari negara-negara maju, melakukan pengelolaan hasil bumi di Provinsi Timor – Timur. Selain itu, pemerintah Timor – Timur, sebelum melepaskan diri dari Negara Kesatuan

Republik Indonesia, pemerintah Indonesia memberikan akses pendidikan bagi warga Timor – Timur. Melalui kucuran dana APBN dan dana OTSUS. Masyarakat Timor – Timur didorong oleh pemerintah Indonesia, agar menjadi masyarakat yang unggul.

Sama seperti Indonesia, penduduk Timor – Timur, akan mengalami bonus demografi di tahun 2030 – 2045. Bonus demografi ini dapat dimanfaatkan sebagai modal pembangunan daerah. Perlunya peningkatan SDM di wilayah Timor – Timur, agar masyarakat angkatan kerja, dapat melakukan kegiatan produktif, atau melakukan usaha. Disatu sisi, masyarakat muda, dapat berdaya, melalui pengelolaan sumber daya alam secara mandiri, jika pemerintah mendidik masyarakat Timor-Timur, melalui pendidikan yang layak. Perlu adanya, transfer knowledge atau transfer ilmu, agar pengelolaan sumber daya alam atau hasil bumi, dapat dikelola secara mandiri oleh masyarakat Timor – Timur.

Pertumbuhan Ekonomi

Kehidupan perekonomian di wilayah Timor – Timur, belum memiliki peningkatan yang signifikan. Timor – Timur dikategorikan oleh Bank Dunia, sebagai negara yang memiliki tingkat

pendapatan yang rendah. Timor – Timur menempati urutan ke – 153 dalam indeks pembangunan manusia. Sebanyak 20%, masyarakat Timor – Timur merupakan pengangguran. Selanjutnya, sebanyak 52,9%, masyarakat Timor – Timur hanya memiliki pendapatan sebesar 1,25\$ USD / hari. Lalu, sebagian besar penduduk Timor – Timur mengalami buta huruf. Oleh sebab itu, masyarakat Timor – Timur tidak dapat membaca, menulis, dan menghitung. Menurut data sensus, pada tahun 2010, sebanyak 87,7% rumah kota².

Kemudian, 18,9%, rumah desa tersambung dengan aliran listrik. Rata-rata, rumah – rumah di wilayah Timor – Timur, telah dilaliri listrik sebanyak 36,7%. Pada tahun 2007, Wilayah Timor – Timur mengalami gagal panen. Oleh karena itu, Timor – Timur dilanda bencana kelaparan. Negara-negara di Asia Tenggara, turut membantuk bencana tersebut, termasuk Indonesia. Saat ini, mata uang yang berlaku di wilayah Timor – Timur adalah mata uang USD (Dollar Amerika Serikat) dan mata uang nasional. Pada tahun 2012, PDB (Produk Domestik Bruto) mencapai \$1,293 miliar. Lalu, pertumbuhan PDB per

tahunnya mencapai angka 8%. Sebagian besar, perekonomian di Timor – Timur digerakkan oleh sektor jasa sebesar 55%.

Lalu, pendapatan per kapita mencapai \$3,620. Pada tahun 2007, inflasi di wilayah Timor – Timur mencapai 7,8%. Sebanyak 49,7%, masyarakat Timor – Timur berada di bawah garis kemiskinan. Industry utama dalam menggerakkan perekonomian di wilayah Timor – Timur, di dominasi oleh usaha percetakan, produksi sabun, kerajinan tangan, pakaian rajutan. Komoditas ekspor dari wilayah Timor – Timur, yaitu kopi cendana dan marmer. Akibat iklim yang cukup hangat, komoditas kopi dari wilayah Timor – Timur, merupakan komoditas unggulan dalam hal ekspor. Iklim geografis wilayah Timor – Timur merupakan iklim yang memiliki kesamaan dengan iklim geografis wilayah Indonesia.

Pembahasan Kebijakan Moneter pada tahun 1976-1998 di Provinsi Timor - Timur

Era pemerintahan Bapak Presiden Soeharto, Presiden Soeharto memiliki rencana pembangunan Indonesia selama lima tahun, atau biasa disebut dengan REPELITA (Rencana Pembangunan Lima

² Afin, Rifai dan Rumayya. (2005). *Convergence in Price Level Among East Java's Region*. Makalah disampaikan dalam 7th Indonesian Regional Science Association (IRSA) International Conference.

Jakarta: Economics Faculty University of Indonesia.

Tahun). REPELITA terbagi kedalam lima bagian. Adapun table diatas, merupakan kondisi perekonomian Indonesia, pada periode REPELITA II. Bila melihat table diatas, bahwa nilai inflasi dengan nilai PDB, berbanding terbalik. Jadi, jika inflasi dapat dikendalikan dengan baik, maka perekonomian dapat tumbuh. Inflasi merupakan pemicu dalam perekonomian. Sedangkan PDB, merupakan tingkat pertumbuhan ekonomi suatu negara. Inflasi dan PDB pada periode 1976 – 1980, melalui table diatas, terlihat cukup stabil.

Tahun 1969-1971 inflasi berada pada level di bawah 10%. Kemudian pada tahun 1972 sampai dengan 1980-an laju inflasi rata-rata berada pada level dua digit.

Dari tabel di atas bisa dilihat inflasi dekade 1969-an lebih fluktuatif dibandingkan dekade-dekade sesudah itu. Inflasi tertinggi terjadi pada tahun 1974 yaitu 33,32%. Di sisi lain inflasi terendah terjadi pada tahun 1971 sebesar 2,42%³.

Ditinjau dari pengeluaran anggaran maka pada tahap pertama periode tahun 1960-an, pengeluaran anggaran pemerintah semakin besar, terutama dalam pembiayaan proyek pemerintah yang

menambah dampak *inflatoir* dari pelaksanaan keuangan negara.

Guna mengatasi perkembangan ini, pada tanggal 13 Desember 1965, pemerintah menerbitkan uang rupiah baru yang nilainya diciutkan. Nilai Rp 1.000 (uang lama) diturunkan menjadi Rp 1 (uang baru). Guna mempertahankan cadangan devisa yang terus menurun pada periode ini, pemerintah melakukan pengawasan terhadap sumber devisa yaitu lalu lintas perdagangan serta penerimaan dan pengeluaran devisa di bidang jasa-jasa serta pengawasan modal untuk mencegah pelarian modal ke luar negeri. Hal ini merupakan salah satu langkah untuk menyelamatkan perekonomian pada masa transisi.

Masa kekuasaan Presiden Soeharto merupakan periode kekuasaan terpanjang dibandingkan presiden lain di Indonesia hingga saat ini. Pasang surut perekonomian Indonesia paling dirasakan pada masa pemerintahannya. Soeharto menjadi presiden pada saat perekonomian Indonesia tidak berada dalam kondisi baik. Pemerintahan Presiden Soeharto dikenal dengan pemerintahan Orde Baru yang

³ Arif, Sritua. (1993). *Metodologi Penelitian Ekonomi*. Jakarta: UI Press.

menggantikan pemerintahan Orde Lama yang dipimpin oleh Presiden Soekarno.

Memasuki pemerintahan Orde Baru pada tahun 1966 konsentrasi pemerintah lebih ditujukan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan ekonomi dan sosial di tanah air. Selama 1966 sampai dengan 1970 upaya-upaya pemerintah terfokus pada pemulihan stabilitas ekonomi, sosial dan politik terutama rehabilitasi ekonomi. Pemerintahan Orde baru menjalin kembali hubungan baik dengan pihak barat dan menjauhi pengaruh pihak ideologi komunis. Indonesia juga kembali menjadi anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan lembaga-lembaga dunia lainnya, seperti Bank Dunia dan Dana Moneter Internasional (International Monetary Fund – IMF).

Langkah-langkah yang dilakukan oleh Pemerintahan Soeharto pada awal masa kekuasaannya sebagai berikut: mengeluarkan Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing. UU Nomor 1 Tahun 1967 menjadi dasar terbukanya pintu bagi investor asing untuk menanam modal di Indonesia. Langkah kedua pada tahun 1968 membuat Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita) yang mendorong swasembada. Program ini mendongkrak

pertumbuhan ekonomi Indonesia hingga tembus 10,92 persen pada 1970. Repelita 1969-1970, sebagai rencana pembangunan tahap pertama, telah menentukan sektor pertanian sebagai bidang sasaran utama dari setiap kegiatan-kegiatan pembangunan. Pembangunan ekonomi Indonesia pada masa Orde Baru memiliki tujuan jangka panjang adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui proses industrialisasi dalam skala besar, pada masa itu dianggap sebagai satu-satunya cara paling tepat dan efektif menanggulangi masalah-masalah ekonomi seperti defisit neraca pembayaran dan banyaknya pengangguran sehingga perlu dibukanya kesempatan kerja. Sistem pembangunan ekonomi tersebut memberikan dampak cukup signifikan secara makro yaitu pertumbuhan ekonomi rata-rata 7% selama periode 1969-1990. Tahun anggaran 1969-1970 merupakan tahun pertama pelaksanaan pembangunan. Pelaksanaan pembangunan yang sungguh-sungguh diperlukan untuk dapat mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merupakan harapan rakyat Indonesia seluruhnya. Pelaksanaan pembangunan yang berhasil mensyaratkan adanya tekad dan

kesungguhan untuk sepenuhnya mengabdikan dan melibatkan diri di dalam usaha-usaha pembangunan tersebut. Pengalaman menunjukkan bahwa selama bertahun-tahun tekad dan kesungguhan tersebut diarahkan kepada kegiatan-kegiatan yang kurang berhubungan dengan usaha-usaha pembangunan yang sesungguhnya. Tindakan semacam itu hanya menghabiskan waktu dan tenaga saja dan tidak dapat dipertanggung-jawabkan dilihat dari sudut pelaksanaan dan tujuan pembangunan yang sesungguhnya. Usaha-usaha pembangunan harus didahului dengan usaha-usaha mewujudkan stabilisasi dan rehabilitasi. Dampaknya cukup signifikan yaitu pertumbuhan ekonomi mencapai rata-rata 7% selama 1969-1990. Pada tahun 1980-an sistem perekonomian berubah dari sentralisasi (1970) menjadi desentralisasi, peran sektor swasta semakin besar, dan masuknya modal asing. Namun, pada sektor mikro tidak terlalu menggembirakan dimana jumlah kemiskinan masih tinggi, kesenjangan ekonomi masih besar.

Hasil-hasil yang telah dicapai Pemerintah selama dua tahun terakhir ini menunjukkan bahwa usaha-usaha menciptakan stabilisasi harga semakin

lama semakin berhasil. Bila di dalam tahun 1966 tingkat kenaikan indeks biaya hidup adalah 637% setahun atau 53% rata-rata per bulan, maka di dalam tahun 1967 indeks biaya-hidup itu hanya naik 112% setahun atau 9% rata-rata per bulan. Di dalam 11 bulan pertama tahun 1968 keadaan adalah lebih baik lagi, yaitu indeks biaya-hidup hanya bergerak ke atas sebesar 79% atau 7% rata-rata per bulan. Bila diambil masa semester kedua tahun 1968, maka kemantapan harga lebih kelihatan, sebab indeks biaya hidup hanya bergerak ke atas sebesar 11% atau 2% rata-rata per bulan (Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 1969-1970, p.2). Dengan memahami hal-hal yang disebutkan tadi maka pelaksanaan kegiatan-kegiatan pembangunan yang akan dilakukan Pemerintah untuk tahun anggaran 1969-1970 akan mencapai jumlah yang besarnya diperkirakan Rp 123,4 milyar. Perkiraan sebesar Rp 123,4 milyar ini berasal dari sumber-sumber sebagai berikut: nilai lawan rupiah BE Kredit, Project Aid dan bagian yang disisihkan dari penerimaan dalam negeri (*public savings*). Ditinjau dari perkembangan harga tahun 1968 menunjukkan gerakan yang lebih mantap bila dibandingkan dengan keadaannya di

dalam tahun 1967. Bila dibandingkan dengan perkembangan di dalam tahun 1966, yaitu sebelum dilakukan usaha-usaha stabilisasi dan rehabilitasi yang dilaksanakan sungguh-sungguh, maka perkembangan harga di dalam tahun 1968 telah memperlihatkan hasil-hasil yang jauh lebih mantap lagi.

Banyak yang beranggapan bahwa kebutuhan akan pembangunan ekonomi baru muncul setelah Perang Dunia II. Ini dimulai dengan program bantuan luar negeri Amerika Serikat, yang disebut Rencana Marshall (*Marshall Plan*), kepada negara-negara Eropa Barat dan Jepang. Di lain pihak, bagi negara yang baru merdeka setelah Perang Dunia II, pembangunan juga dipandang sebagai tindak lanjut perjuangan politik.

Hal inilah yang mendorong lahirnya ekonomi pembangunan, setidaknya terdapat tiga pilar utama yang memunculkan teori pembangunan, yaitu pertumbuhan ekonomi, bantuan luar negeri, dan perencanaan. Meskipun terdapat berbagai variasi pemikiran waktu, pembentukan model dianggap sebagai kunci kearah keberhasilan pembangunan (Preston, 1985).

Di sisi lain, pertumbuhan ekonomi Indonesia juga mengalami banyak perubahan. Selama dekade 1970-an dan 1980-an, proses pembangunan mengalami banyak hambatan yang terutama disebabkan oleh faktor-faktor eksternal seperti merosotnya harga minyak mentah internasional pada dasawarsa 1980-an dan adanya resesi ekonomi dunia. Di tengah berbagai hambatan internal maupun eksternal, Indonesia tetap mampu mencapai pertumbuhan ekonomi yang impresif. Setelah hampir 30 tahun (1969-1997) Indonesia mengalami tingkat pertumbuhan ekonomi yang cukup signifikan tersebut, sayangnya pada tahun 1998 laju pertumbuhan ekonomi Indonesia minus 13,13% akibat dari krisis moneter 1997⁴.

Dengan terjadinya krisis pada masa transisi maka tantangan kebijakan ekonomi makro, perekonomian Indonesia menunjukkan kinerja yang luar biasa selama satu dasawarsa setelah terjadinya krisis Asia, sebagai hasil dari kebijakan ekonomi makro yang hati-hati dan reformasi kebijakan yang efektif pada saat itu sehingga bangsa Indonesia dapat

⁴ Sukirno, Sadono. (2003). *Mikro Ekonomi: Teori Pengantar*. Jakarta: Raja Garfindo Persada.

menikmati kemajuan selama beberapa tahun terakhir. Akan tetapi, tingkat pertumbuhan sedikit menurun dalam beberapa tahun terakhir, yang tercermin dari melemahnya permintaan internasional dan melambatnya pertumbuhan investasi akibat harga komoditas yang lebih rendah serta meningkatnya ketidakpastian peraturan pemerintah dan adanya hambatan infrastruktur.

Saat ini, Indonesia masih berada dalam tahap pertumbuhan, akan tetapi laju reformasi telah melambat dalam beberapa tahun terakhir dan pemerintah telah mengambil sejumlah langkah perdagangan proteksionis. Hal ini sangat membantu pemerintah untuk memperbaiki sistem perekonomian Indonesia pada waktu itu. Faktor internal maupun eksternal akan tetap menjadi tantangan dalam pelaksanaan kebijaksanaan moneter. Untuk memastikan meningkatnya standar kehidupan secara berkelanjutan bagi seluruh rakyat Indonesia, stabilitas ekonomi makro perlu dijaga, berbagai macam reformasi struktural perlu dilakukan, dan juga perlu disediakan ruang fiskal yang lebih lebar untuk meningkatkan belanja pemerintah dalam bidang-bidang prioritas seperti

pendidikan, kesehatan, pengentasan kemiskinan dan infrastruktur.

Penghapusan sebagian besar subsidi bahan bakar minyak yang dilakukan, merupakan langkah yang patut dipuji menuju arah tersebut. Akan tetapi, harga ekspor komoditas yang rendah dan pertumbuhan yang lebih lambat sekarang ini menandakan bahwa ruang fiskal yang lebih lebar tersebut harus berasal dari peningkatan pendapatan pajak yang masih rendah pada saat ini dan rencana tersebut harus dilakukan secara hati-hati. Selain itu, peningkatan efisiensi dan penargetan belanja pemerintah di tingkat pusat maupun daerah juga dilakukan.

Pada akhir 1960-an kebijakan moneter dan fiskal ortodoks yang diusulkan para teknokrat itu telah berhasil menurunkan inflasi. Selain itu, hubungan dengan komunitas donor internasional telah dibangun kembali, berkebalikan dengan kebijakan Soekarno yang memutuskan dengan kapitalis dunia.

Pada tahun 1972 dan 1980, GDP riil tumbuh pada angka tahunan 7,3%. Sebagian besar berkat kenaikan harga minyak. Pada tahun 1973 harga minyak internasional naik empat kali lipat yang menghasilkan pemasukan berlimpah untuk Indonesia. Pada tahun 1973 harga

minyak internasional naik empat kali lipat yang menghasilkan pemasukan yang berlimpah untuk Indonesia.

Disamping itu Indonesia memperoleh keuntungan dari peningkatan volume substansial karena upaya-upaya eksplorasi minyak sebelumnya. Volume ekspor minyak mentah meningkat hingga 55 persen antara tahun 1972 dan memuncak pada tahun 1977. Selain ekspor migas, sektor non migas ditinjau dari sisi ekspor juga berkembang dengan baik. Ekspor kayu dan kopi meningkat volumenya, dan harga dunia untuk karet, minyak sawit, dan timah naik secara substansial pada tahun 1973 dan tahun 1974 dan untuk kopi pada tahun 1977 (Bevan *et al*, 1999, p.244)⁵.

Ekspor tahun 1967 sampai dengan bulan Oktober berjumlah US\$ 354,8 juta (di luar minyak). Angka sementara ekspor sampai dengan bulan Oktober 1968 menunjukkan bahwa jumlahnya telah mencapai US\$ 376,0 juta (di luar minyak). Impor tahun 1967 sampai dengan bulan Oktober berjumlah US\$ 469,0 juta (di luar minyak). Angka sementara impor sampai dengan bulan Oktober 1968 berjumlah

US\$ 553,4 juta (di luar minyak). Ditinjau dari perkembangan harga di dalam tahun 1968 menunjukkan gerakan yang lebih mantap bila dibandingkan dengan keadaannya di dalam tahun 1967. Bila dibandingkan dengan perkembangan di dalam tahun 1966, yaitu sebelumnya usaha-usaha stabilisasi dan rehabilitasi dilancarkan secara sungguh-sungguh, maka perkembangan harga di dalam tahun 1968 telah memperlihatkan hasil-hasil yang jauh lebih mantap lagi. Di bawah ini disajikan suatu tabel yang memperlihatkan perkembangan indeks biaya hidup dan indeks harga beras sejak tahun 1966. Pelaksanaan kebijaksanaan anggaran berimbang, kebijaksanaan kredit yang selektif dan terarah serta kebijaksanaan neraca pembayaran yang juga diarahkan telah memberikan pengaruh yang berlain-lainan terhadap perkembangan jumlah uang yang beredar. Mengenai hal ini dapat dibaca lebih lanjut di dalam bagian perkembangan kredit tentang sebab-sebab berambahnya uang yang beredar. Sejak tahun anggaran 1967 yang lalu APBN tidaklah lagi menjadi penyebab utama dari pertambahan jumlah uang

⁵ Boediono. 2016. *Ekonomi Indonesia : Dalam Lintasan Sejarah*. Jakarta:Mizan

yang beredar; penyebab-utamanya adalah kredit perbankan. Hal ini berarti bahwa penambahan jumlah uang yang beredar telah menambah daya produksi masyarakat, sebab di dalam sektor perbankan telah dilaksanakan kebijaksanaan kredit yang selektif dan terarah. Suatu kejadian bersejarah telah menambah cerah warna kehidupan ketatanegaraan Republik Indonesia di ambang pintu Repelita II. Untuk pertama kali sejak proklamasi kemerdekaan Negara Republik Indonesia, MPR hasil Pemilu telah menetapkan Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) dan memilih penyelenggara Pemerintah Negara tertinggi dibawah Majelis, yakni Presiden dan Wakil Presiden. Seperti yang telah ditegaskan oleh MPR, Garis-garis Besar Haluan Negara adalah suatu haluan Negara dalam garis-garis besar yang hakekatnya adalah suatu Pola Umum Pembangunan Nasional. Pola tersebut merupakan rangkaian program-program pembangunan disegala bidang yang berlangsung secara terus-menerus dan dimaksudkan untuk mewujudkan tujuan nasional seperti termaksud didalam Pembukaan Undang-undang Dasar 1945, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tanah tumpah darah Indonesia dan untuk demajukan

kesejahteraan umum' mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Dalam tahun anggaran 1974-1975 penerimaan dalam negeri diperkirakan sebesar Rp 1.363,4 milyar, suatu jumlah yang merupakan lebih dari 450 persen dibandingkan dengan penerimaan pada permulaan Repelita I meningkatnya penerimaan dari sektor perpajakan merupakan hasil positif dari konsolidasi dan penertiban aparatur dan juga kenaikan penerimaan minyak bumi sebagai akibat meningkatnya produksi, volume ekspor maupun harga minyak di pasaran internasional. Hal ini tercermin dalam jumlah volume APBN 1974/1975 yang melampaui Rp 1,577 trilyun dan merupakan anggaran yang terbesar yang pernah dicapai hingga kini. (Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 1974-1975, p.7).

Hal ini akan sangat memperluas kegiatan pembangunan dalam tahun pertama Repelita II sehingga dapat dijadikan landasan yang kuat untuk lebih meningkatkan pelaksanaan pembangunan pada tahun-tahun berikutnya. Dengan meningkatnya

volume APBN maka pengeluaran terus bertambah. Jika dalam tahun anggaran 1969/1970 pengeluaran negara baru berjumlah Rp 334,7 milyar, jumlah tersebut telah meningkat hampir lebih dari 450 % dalam tahun anggaran 1974/1975. Pengeluaran negara sebesar itu ditujukan untuk membiayai kegiatan pembangunan dan kegiatan Pemerintah lainnya. Sejak permulaan pembangunan Pemerintah telah menetapkan sikap bahwa seiring dengan perbaikan ekonomi yang akan meningkatkan pendapatan riil pegawai negeri dan ABRI, secara bertahap gaji pegawai negeri/ABRI dinaikkan sesuai dengan kesanggupan keuangan negara. Dinamika perekonomian di Indonesia yang terus bergulir menuntut pemerintah dan seluruh stakeholder (para pelaku ekonomi) untuk peka terhadap fenomena yang terus berubah dari waktu ke waktu. Tanpa mengikuti pergerakan tersebut sangat mustahil untuk dapat menangkap fenomena yang ada beserta keterkaitan unsur-unsur dan struktur di dalamnya. Sedangkan pembangunan ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat menuntut para pembuat kebijakan (pemerintah) peka terhadap gejolak ekonomi yang terjadi. Perencanaan pembangunan ekonomi di

suatu negara memerlukan berbagai macam indikator ekonomi. Dengan indikator ekonomi yang representatif, strategi pembangunan baik itu jangka menengah maupun pembangunan jangka panjang akan lebih terarah. Salah satu alat ukur atau indikator ekonomi yang sangat dibutuhkan sebagai bahan evaluasi dan perencanaan ekonomi makro terdapat dalam Produk Domestik Bruto (PDB). Melalui PDB dengan segala turunannya dapat dilihat potret perekonomian dalam suatu negara. Umumnya PDB disajikan dalam runtun waktu/series tahunan. Produk Domestik Bruto dapat memberikan gambaran tentang perekonomian yang dapat berguna bagi para ahli yang bergerak dibidang perencanaan, pengambilan keputusan baik bersifat jangka pendek maupun jangka panjang, pembelanjaan, perumusan perpajakan, keuangan, tenaga kerja sektoral dan kebijakan ekonomi lainnya yang dibuat oleh pemerintah maupun stakeholder lainnya.

Di kebanyakan negara pengeluaran konsumsi sekitar 50%-75% dari *Gross Domestic Product* (GDP) sehingga konsumsi rumah tangga dapat mempengaruhi fluktuasi kegiatan ekonomi dari waktu ke waktu, dimana konsumsi individu berbanding lurus

dengan pendapatannya. Di Indonesia, konsumsi juga memiliki peranan yang sangat dominan dalam perekonomian, dimana kontribusi konsumsi terhadap perekonomian Indonesia sangat besar dan dominan yaitu 57,7%-73,9% dari GDP. Konsumsi rumah tangga terjadi karena adanya pendapatan yang diperoleh rumah tangga yang berasal dari penggunaan faktor-faktor produksi yang dimilikinya yang dibedakan menjadi empat golongan yaitu tanah, tenaga kerja, modal dan keahlian kewirausahaan.

PDB Indonesia mulai pada tahun 1966 (memasuki masa orde baru) mengalami laju pertumbuhan yang meningkat drastis dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Di mana pada tahun sebelumnya yaitu periode 1960-1966 (Masa Orde Lama) perkiraan laju pertumbuhan PDB Indonesia hanya 1,90%, dan memasuki Masa Orde Baru pada periode (1966-1973) laju pertumbuhan PDB Indonesia telah memasuki masa-masa cemerlang dengan perkiraan pertumbuhan sebesar 6%. Hal ini dapat dikatakan sebagai dampak pemberlakuan Repelita I dan repelita-repelita yang berikutnya. Pada Repelita I, pemerintah menekankan pada pembangunan sektor pertanian dan industri-industri terkait,

seperti agroindustri. Pemerintah juga memfokuskan perhatian pada pembangunan-pembangunan industri yang dapat menghasilkan devisa lewat ekspor dan substitusi impor.

Dalam empat dekade terakhir (1969-1980), PDB Indonesia berdasarkan harga konstan tahun 1973 secara garis besar mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Artinya bahwa secara riil, jumlah atau volume barang dan jasa yang diproduksi di Indonesia hampir selalu meningkat sejak 1969-1980. Bahkan secara kasar, dapat dikatakan bahwa jumlah produksi barang dan jasa di Indonesia pada tahun 1980 telah meningkat sebesar lebih dari sepuluh kali lipat dibandingkan dengan tahun 1973 (10 tahun silam). Namun di sisi lain, pertumbuhan ekonomi Indonesia juga mengalami banyak perubahan dan fenomena. Selama dekade 1970-an dan 1980-an, proses pembangunan mengalami banyak hambatan yang terutama disebabkan oleh faktor-faktor eksternal seperti merosotnya harga minyak mentah internasional pada dasawarsa 1980-an dan adanya resesi ekonomi dunia. Di tengah berbagai hambatan internal maupun eksternal, Indonesia tetap mampu mencapai pertumbuhan ekonomi yang impresif.

Setelah hampir 30 tahun (1969–1997) Indonesia mengalami tingkat pertumbuhan ekonomi yang cukup signifikan tersebut, sayangnya pada tahun 1998 laju pertumbuhan ekonomi Indonesia minus 13,13% akibat dari krisis moneter 1997.

Dalam tahun anggaran 1974/1975 penerimaan dalam negeri diperkirakan sebesar Rp 1.363,4 milyar, suatu jumlah yang merupakan lebih dari 450 persen dibandingkan dengan penerimaan pada permulaan Repelita I. Peningkatan penerimaan dari sektor perpajakan merupakan hasil positif dari konsolidasi dan penertiban aparatur dan juga kenaikan penerimaan minyak bumi sebagai akibat meningkatnya produksi, volume ekspor maupun harga minyak di pasaran internasional. Hal ini tercermin dalam jumlah volume APBN 1974-1975 yang melampaui Rp 1,577 trilyun dan merupakan anggaran yang terbesar yang pernah dicapai hingga kini.

Kebijakan Fiskal pada tahun 1976-1998 di Provinsi Timor – Timur

Dalam tahun anggaran 1974-1975 penerimaan dalam negeri diperkirakan

sebesar Rp 1.363,4 milyar, suatu jumlah yang merupakan lebih dari 450 persen dibandingkan dengan penerimaan pada permulaan Repelita I meningkatnya penerimaan dari sektor perpajakan merupakan hasil positif dari konsolidasi dan penertiban aparatur dan juga kenaikan penerimaan minyak bumi sebagai akibat meningkatnya produksi, volume ekspor maupun harga minyak di pasaran internasional. Hal ini tercermin dalam jumlah volume APBN 1974/1975 yang melampaui Rp 1,577 trilyun dan merupakan anggaran yang terbesar yang pernah dicapai hingga kini. (Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 1974-1975, p.7)⁶. Hal ini akan sangat memperluas kegiatan pembangunan dalam tahun pertama Repelita II sehingga dapat dijadikan landasan yang kuat untuk lebih meningkatkan pelaksanaan pembangunan pada tahun-tahun berikutnya. Dengan meningkatnya volume APBN maka pengeluaran terus bertambah. Jika dalam tahun anggaran 1969/1970 pengeluaran negara baru berjumlah Rp 334,7 milyar, jumlah tersebut telah meningkat hampir lebih

⁶ Basri, Yuswar Z dan Mulyadi Sabri. (2003). *Keuangan Negara dan Analisis Kebijakan Utang Luar Negeri*. Jakarta: PT. Rajawali Grafindo Persada.

dari 450 % dalam tahun anggaran 1974/1975. Pengeluaran negara sebesar itu ditujukan untuk membiayai kegiatan pembangunan dan kegiatan Pemerintah lainnya. Sejak permulaan pembangunan Pemerintah telah menetapkan sikap bahwa seiring dengan perbaikan ekonomi yang akan meningkatkan pendapatan riil pegawai negeri dan ABRI, secara bertahap gaji pegawai negeri/ABRI dinaikkan sesuai dengan kesanggupan keuangan negara.

Dinamika perekonomian di Indonesia yang terus bergulir menuntut pemerintah dan seluruh stakeholder (para pelaku ekonomi) untuk peka terhadap fenomena yang terus berubah dari waktu ke waktu. Tanpa mengikuti pergerakan tersebut sangat mustahil untuk dapat menangkap fenomena yang ada beserta keterkaitan unsur-unsur dan struktur di dalamnya.

Sedangkan pembangunan ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat menuntut para pembuat kebijakan (pemerintah) peka terhadap gejolak ekonomi yang terjadi. Perencanaan pembangunan ekonomi di suatu negara memerlukan berbagai macam indikator ekonomi. Dengan indikator ekonomi yang representatif, strategi pembangunan baik itu jangka

menengah maupun pembangunan jangka panjang akan lebih terarah.

Salah satu alat ukur atau indikator ekonomi yang sangat dibutuhkan sebagai bahan evaluasi dan perencanaan ekonomi makro terdapat dalam Produk Domestik Bruto (PDB). Melalui PDB dengan segala turunannya dapat dilihat potret perekonomian dalam suatu negara. Umumnya PDB disajikan dalam runtun waktu/series tahunan. Produk Domestik Bruto dapat memberikan gambaran tentang perekonomian yang dapat berguna bagi para ahli yang bergerak dibidang perencanaan, pengambilan keputusan baik bersifat jangka pendek maupun jangka panjang, pembelanjaan, perumusan perpajakan, keuangan, tenaga kerja sektoral dan kebijakan ekonomi lainnya yang dibuat oleh pemerintah maupun stakeholder lainnya. Di kebanyakan negara pengeluaran konsumsi sekitar 50%-75% dari *Gross Domestic Product* (GDP) sehingga konsumsi rumah tangga dapat mempengaruhi fluktuasi kegiatan ekonomi dari waktu ke waktu, dimana konsumsi individu berbanding lurus dengan pendapatannya. Di Indonesia, konsumsi juga memiliki peranan yang sangat dominan dalam perekonomian, dimana kontribusi konsumsi terhadap

perekonomian Indonesia sangat besar dan dominan yaitu 57,7%-73,9% dari GDP. Konsumsi rumah tangga terjadi karena adanya pendapatan yang diperoleh rumah tangga yang berasal dari penggunaan faktor-faktor produksi yang dimilikinya yang dibedakan menjadi empat golongan yaitu tanah, tenaga kerja, modal dan keahlian kewirausahaan.

Anggaran Pertahanan pada tahun 1976 – 1998

Anggaran pertahanan Indonesia pada periode 1976 – 1998, mengalami kenaikan yang signifikan. Indonesia mengalami puncak perekonomian pada tahun 1994, pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 7%. Hal ini disebabkan oleh kucuran dana asing, serta UU (Undang-Undang) PMA (Penanaman Modal Asing) pada tahun 1967.

Implikasi dari investasi dari luar negeri, Indonesia melakukan revitalisasi di seluruh sektor. Salah satunya, sektor pertahanan. Selain melakukan peningkatan ALUTSISTA (Alat Utama Sistem Senjata), kala itu, Indonesia mampu menciptakan pesawat komersil. Indonesia menghasilkan pesawat komersil dengan merek N250 Gatot Kaca.

Pada tanggal 10 Agustus 1995, pesawat N250 mengudara di langit Indonesia. Kala itu, prosesi penerbangan pertama diresmikan oleh Bapak Presiden Soeharto. Pesawat N250, merupakan bukti dari revitalisasi industri pertahanan Indonesia. Pesawat ini, merupakan pesawat kebanggaan Indonesia. Indonesia merupakan satu-satunya negara yang memiliki pesawat terbang. Pada periode 1976 – 1998, Indonesia memiliki dua industri strategis di bidang pertahanan. Pertama, PT. Pindad dan kedua PT. Dirgantara Indonesia. Kedua industri merupakan industri pertahanan milik pemerintah Indonesia. Awal mula industri, adalah naturalisasi dari industri pertahanan milik kolonial belanda di bidang persenjataan.



Gambar 5. PT Pindad
Sumber : Pindad, 2020

Awal mulanya, Industri Pertahanan Indonesia, merupakan milik kolonial belanda. Seiring berjalannya waktu, Industri Pertahanan Indonesia, diambil alih oleh pemerintah Indonesia. Hingga

saat ini, Industri Pertahanan Indonesia, mampu menjadi sektor andalan pemerintah, sebagai bentuk promosi Indonesia, serta meningkatkan kekuatan pertahanan Indonesia.

Implikasi Anggaran Pertahanan atas Kebijakan Moneter & Fiskal Tahun 1976 – 1998 di Provinsi Timor – Timur

Kondisi politik, sosial dan ekonomi Indonesia mengalami berbagai pasang surut semenjak kemerdekaan. Indonesia pasca merdeka sejak 17 Agustus 1945 mengalami banyak masa-masa politik yang secara tidak langsung menciptakan kondisi ekonomi yang berbeda. Sejak pengalihan kedaulatan pada Desember 1949 sampai dengan kudeta militer tahun 1965, yang merupakan awal kejatuhan Presiden Soekarno, Indonesia diwarnai dengan riuh rendahnya politik (Dick *et al*, 2002, p.170). Dinamika politik Indonesia dimulai dengan masa Demokrasi Parlementer pada periode tahun 1950 hingga 1958, pada masa ini terjadi peristiwa penting yaitu pemilihan umum pertama pada tahun 1955. Setelah masa transisi tahun 1958 menuju Demokrasi Terpimpin tahun 1959, kemudian dilanjutkan hingga tahun 1965. Mulai dari masa orde lama yang saat itu dipimpin oleh Bapak Proklamator Indonesia yaitu Bapak Soekarno.

Masa orde lama, kondisi ekonomi Indonesia yang kurang stabil pada saat awal kemerdekaan seperti adanya pemberontakan dan semangat melawan penjajahan blok Barat serta blokade ekonomi oleh Belanda menjadikan ekonomi Indonesia kurang baik. Hal ini ditunjukkan dengan kas negara kosong, dalam artian tidak ada pemasukan baik ekspor maupun pemasukan dalam negeri, serta hibah ke Indonesia. Selain itu setelah pengakuan kedaulatan Indonesia oleh Belanda, meninggalkan warisan seluruh hutang Belanda ditambah kesibukan Indonesia untuk menasionalisasi perusahaan-perusahaan Belanda dan juga memadamkan pemberontakan-pemberontakan yang terjadi membuat Indonesia tidak bisa fokus membangun ekonomi. Walaupun Indonesia mengubah sistem pemerintahan parlementer menjadi sistem pemerintahan terpimpin tetap tidak bisa membangun ekonomi menjadi lebih baik. Salah satu kemungkinan yang menjadi sebab adalah Indonesia yang menutup diri dari pihak barat, padahal pada saat itu pihak barat ekonominya sedang berkembang pesat.

Dekade pasca kemerdekaan merupakan periode kemunduran dramatis yang disebabkan oleh kekerasan

dan instabilitas di satu sisi dan pertumbuhan ekonomi yang buruk di sisi lain. Oleh karena itu periode ini dinyatakan sebagai “dekade-dekade yang hilang” (Bates *et al*, 2007, p.925). Sebuah periode kehilangan bagi pembangunan ekonomi disebabkan masalah-masalah kemerdekaan dan instabilitas rezim baru pasca kolonial. Dapat dikatakan bahwa pada masa orde lama perjalanan ekonomi bangsa Indonesia mengalami pasang surut, perjalanan ekonomi bangsa Indonesia mengalami dinamika yang sangat panjang sehingga dalam perjalanan ekonomi dalam sejarah bangsa Indonesia yaitu pada tahun 1945-1966 masa transisi perekonomian karena sebagian besar kegiatan perekonomian dibebani oleh krisis politik tanpa akhir. Pasca masa tersebut sistem ekonomi yang diterapkan yang mengarah pada sistem ekonomi sosialis, sehingga begitu dominannya peran pemerintah melalui BUMN-BUMN dengan bekerja tidak efisien. Seiring berjalannya waktu, pemerintah Indonesia mampu bangkit dari persoalan – persoalan ekonomi pasca kemerdekaan. Presiden Soeharto, sebagai Presiden Kedua Republik Indonesia, melakukan revitalisasi, dan pembangunan infrastruktur yang massif, sehingga pertumbuhan ekonomi

Indonesia dapat tumbuh secara cepat. Periode 1976 – 1998, merupakan periode keemasan, bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia. Indonesia mencapai puncak pertumbuhan ekonomi, hingga mencapai 7% di tahun 1994. Kebijakan moneter dan fiskal, memiliki portofolio yang positif. Sehingga, Indonesia mampu swasembada di bidang pangan. Indonesia mendapatkan penghargaan dari PBB saat itu. Selain itu, Indonesia memiliki provinsi baru, yaitu, Provinsi Timor - Timur. Pada tahun 1976, Provinsi Timor – Timur, resmi menjadi bagian dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Melalui kebijakan moneter dan fiskal, pemerintah Indonesia, mendukung Provinsi Timor – Timur, melalui dukungan dana APBN dan dana OTSUS.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dianalisis oleh peneliti serta disajikan secara mendalam maka dikemukakanlah beberapa kesimpulan. Adapun kesimpulan diharapkan dapat bermanfaat bagi perkembangan perekonomian di Timor - Timur serta dalam rangka memperkuat pertahanan. Adapun kesimpulan tersebut peneliti paparkan secara sistematis sebagai berikut , Kebijakan fiskal dan

kebijakan moneter pada tahun 1976 – 1998, mengalami pasang surut. Situasi politik pada periode tersebut, memiliki implikasi yang signifikan terhadap perekonomian Indonesia secara luas. Pada tahun 1994, Indonesia mampu melaksanakan program swasembada besar. Hal ini merupakan bukti atas konsistensi pemerintah, dalam melaksanakan program pembangunan berkelanjutan. Provinsi Timor – Timur, memiliki kesempatan untuk dapat meningkatkan perekonomian di wilayah tersebut. Sebagai provinsi yang termuda kala itu, melalui kucuran dana APBN dan dana otonomi khusus, pertumbuhan perekonomian dan infrastruktur dapat tumbuh secara cepat. Implikasi anggaran pertahanan terhadap kebijakan moneter dan kebijakan fiskal, memberikan pengaruh yang positif, bagi pembangunan di wilayah Provinsi Timor – Timur pada tahun 1976 – 1998. Keamanan di wilayah tersebut menjadi meningkat, sehingga pembangunan dan aktivitas ekonomi, maupun pertukaran barang dan jasa dapat dilakukan. Sehingga, masyarakat Provinsi Timor – Timur dapat memiliki pendapatan.

Daftar Pustaka Buku

- Afin, Rifai dan Rumayya. (2005). *Convergence in Price Level Among East Java's Region*. Makalah disampaikan dalam 7th Indonesian Regional Science Association (IRSA) International Conference. Jakarta: Economics Faculty University of Indonesia.
- Arif, Sritua. (1993). *Metodologi Penelitian Ekonomi*. Jakarta: UI Press.
- Badan Analisa Fiskal Dan Japan International Cooperation Agency. (2002). *Bunga Rampai Kebijakan Fiskal*. Badan Analisa Fiskal Departemen Keuangan (Ed.). Jakarta: Departemen Keuangan.
- Badan Analisa Fiskal. (2004). *Kebijakan Fiskal: Pemikiran Konsep dan Implementasi*. Badan Analisa Fiskal Departemen Keuangan (Ed.). Jakarta: Departemen Keuangan.
- Baltagi, Badi H. (2002). *Econometric Analysis of Panel Data*. New York: John Wiley & Sons. Ltd.
- Bank Indonesia. *Statistik Ekonomi dan Keuangan Indonesia, berbagai edisi penerbitan dan website: www.bi.go.id*. Jakarta: Bank Indonesia.
- Basri, Yuswar Z dan Mulyadi Sabri. (2003). *Keuangan Negara dan Analisis Kebijakan Utang Luar Negeri*. Jakarta: PT. Rajawali Grafindo Persada.
- Budiono. (1985). *Uang dan Bank*. Yogyakarta: BPFE UGM.
- Boediono. 2016. *Ekonomi Indonesia : Dalam Lintasan Sejarah*. Jakarta: Mizan
- Cargill, TF. (1991). *Money, The Financial Sistem and Monetary Policy*. New York: Printice Hall Inc.

- Creswell, John W. . 2015. *Penelitian Kualitatif & Desain Riset Memilih diantara Lima Pendekatan*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar
- Creswell, John W. 2016. *Research Design: Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Enders, Walter. (1995). *Applied Econometric Time Series*. New York: John Wiley and Sons. Inc.
- Gujarati, Damodar N. (2003). *Basic Econometrics*. New York: McGRAW-HILL.
- Iswardono. (1997). *Uang Dan Bank* . Yogyakarta: BPFE UGM.
- Kementrian Pertahanan RI. 2015. *Buku Putih Pertahanan Indonesia*. Jakarta: Kementrian Pertahanan RI
- Lipsey, Richard G. 2014. *Pengantar Ilmu Ekonomi*. Jakarta: Bina Aksara
- Mangkoesebroto, Guritno. 2014. *Ekonomi Publik*. Yogyakarta: BPFE
- Mankiw, N. Gregory. 2007. *Makroekonomi*. Jakarta: Erlangga
- Michael Albert & Robin Hahnel. 1991. *The Political Economy of Paricipatory Economics*. US: Princeton University Press
- Michael P & Todaro Smith. 2015. *Economic Development*. UK: Pearson
- Maddala, G.S. (1993). *The Econometrics Of Panel Data*. New York: Edward Elgar Publising Limited.
- Mankiw, N. Gregory. (2000). *Teori Makro Ekonomi*. Terjemahan. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- _____. (2007). *Makro Ekonomi*. Jakarta : Erlangga.
- Mishkin, Frederic S. (2004). *The Economy of Money, Banking & Financial Market*. New York: Columbia University Press.
- Nambo, A.B. dan M.R. Puluhuluwa. (2005). *Memahami Tentang Beberapa Konsep Politik (Suatu Telaah Politik)*. Mimbar.
- Nopirin. (1992). *Ekonomi Moneter 2*. Yogyakarta: BPFE UGM.
- Pindyck, Robert S. Daniel L. Rubinfeld. (1998). *Econometric Models And Economic Forecasting*.
- Qamar, Nurul. (2009). *Pengantar Hukum Ekonomi*. Makasar: Pustaka Refleksi.
- Sukirno, Sadono. (2003). *Mikro Ekonomi: Teori Pengantar*. Jakarta: Raja Garfindo Persada.
- Suparmoko. (1999). *Pengantar Ekonomi Makro*. Yogyakarta: BPFE UGM.
- Supriatno, Makmur. (2014). *Tentang Ilmu Pertahanan*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor.
- Yusgiantoro, Purnomo. (2014). *Ekonomi Pertahanan: Teori Dan Praktiki*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Yustika, A.E. (2013). *Perekonomian Indonesia*. Malang: BPFE UNIBRAW.

Jurnal

- Afin, Rifai. (2006). "Stabilitas Dan Dispersi Harga Dalam Skema Otonomi Daerah Di Indonesia (Pendekatan Model Cross Section Dan Model Dispersi)". Makalah adalah Back Ground Paper dalam Kongres ISEI ke 16 di Manado. 19 - 21 Juni 2006.
- Aliman. (2003). "Analisis Penerapan Kebijakan Moneter dan Kebijakan Fiskal di Indonesia". *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia*.
- Irdham, Ahmad. (2017). "Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Kebijakan Fiskal".

Bahan Kuliah Prodi Ekonomi
Pertahanan Universitas Pertahanan
Tanggal 6 Juni 2017.

Simorangkir, Iskandar *et al.* (2005).
“Identifikasi Faktor-Faktor Penentu
Inflasi Regional Dalam Era Otonomi
Daerah Pusat Pendidikan Dan
Kebanksentralan, Bank Indonesia”.
Deseminasi hasil penelitian di Unair
Surabaya.

Sriwiyanto, Hery Sulistio Jati Nugroho
dan Tetuko Rawidyo Putro. (2006).
“Tantangan Dan Prospek
Implementasi Kebijakan Stabilitas
Harga Model New Keynesian
Monetary Policy Dalam Perspektif
Otonomi Daerah: Pembuktian
Empiris Di 40 Pemerintah Kota Di
Indonesia (1993-2003)”. Makalah
Disampaikan dalam Kongres ISEI ke
16 di Manado. 19 - 21 Juni 2006.

Supandi. (2018). “Kebijakan Ekonomi
Makro-Mikro”. Bahan Kuliah Prodi
Ekonomi Pertahanan Universitas
Pertahanan Tanggal 6 Juli 2018.

Internet/ Website

Ajim, N. (2020, 115). *Integrasi Timor-timor*.
Retrieved from
www.mikirbae.com:
[https://www.mikirbae.com/2016/05/
/integrasi-timor-timur.html](https://www.mikirbae.com/2016/05/integrasi-timor-timur.html)

Departemen Keuangan. “Laporan
Realisasi Anggaran Pendapatan
Belanja Daerah. Berbagai edisi
penerbitan”. www.depkeu.go.id.
Diakses tanggal 31 Maret 2006